

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tantangan bagi Indonesia di era disrupsi dan revolusi industri 4.0 ini adalah peningkatan daya saing bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di masa depan. Pemerintah pun juga harus sadar dalam mengembangkan perekonomian haruslah berorientasi pada global juga. Paradigma ekonomi global saat ini ditandai oleh berkembangnya ekonomi berbasis pengetahuan. Daya saing di era ekonomi berbasis pengetahuan berpijak pada keunggulan kompetitif terbentuk dari tiga unsur yang berkaitan satu sama lain, di antaranya: (1) modal manusia, (2) kemampuan organisasi, dan (3) penguasaan kompetensi. Ketiganya harus berjalan serempak, di mana kemampuan organisasi dan penguasaan kompetensi itu sendiri pada dasarnya juga tergantung pada keunggulan modal manusia yang menanganinya (Zuhail, 2008). Industri di era revolusi industri 4.0 berbasis pengetahuan membutuhkan pekerja-pekerja yang diistilahkan dengan *knowledge workers* (Hager & Holland, 2006)

Sistem ekonomi baru ini memerlukan para pekerja dengan sejumlah kemampuan-kemampuan yang bersifat luas termasuk keterampilan-keterampilan personal dan *interpersonal* (Rojewski, 2002). Selain memiliki keterampilan teknis dalam bidangnya, industri saat ini sangat membutuhkan pekerja-pekerja yang memiliki keterampilan bersifat generik (*employability skills*). Keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, fleksibilitas, berpikir kreatif, kemampuan mengelola

konflik, mengelola informasi dan sumber daya, serta kapasitas untuk melakukan refleksi juga diharapkan dari para pekerja masa depan (Cairney, 2000).

Dari segi SDM tenaga kerja, Indonesia memiliki beberapa pekerjaan rumah yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini, di antaranya: a.) Produktivitas tenaga kerja yang dinilai masih rendah. b.) Ketidakpastian upah tenaga kerja. c.) Rata-rata pendidikan dan kemampuan berbahasa asing yang rendah. d.) Tingkat pengangguran masih tinggi.¹

Pada tahun 2015 tercatat Indonesia memiliki 55 juta tenaga kerja terampil (ADB, 2015). Berdasarkan perkiraan pada *Masterplan* Percepatan dan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (MP3EI), dari jumlah tersebut masih akan dibutuhkan kurang-lebih 113 juta tenaga kerja terampil hingga tahun 2030 dengan penambahan rata-rata 3,2 juta per tahunnya.

Sedangkan berdasarkan *Global Human Capital Index* oleh *World Economic Forum* (WEF) 2017, peringkat SDM Indonesia berada pada posisi 65 dari 130 negara, tertinggal dibandingkan Malaysia (peringkat 33), Thailand (peringkat 40), dan Vietnam (peringkat 64). Meskipun produktivitas tenaga kerja Indonesia mengalami peningkatan, yaitu dari 81,9 juta rupiah/orang pada tahun 2017 menjadi 84,07 juta rupiah/orang pada tahun 2018, produktivitas tenaga kerja Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Selain itu, pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 4,9 persen di tahun 2017, hanya 0,6 persen yang bersumber dari *Total Factor Productivity* (TFP). Sisanya 2,8 persen pertumbuhan ekonomi bersumber dari modal kapital dan 1,5 persen dari modal manusia.

¹ Setyoko. *Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. *Jurnal Orbith* Vol. 11 No. 2 (Juli 2015). Hlm. 122.

Terkait dengan data di atas, ini berarti kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara optimal. Rendahnya kualitas tenaga kerja yang belum merespons perkembangan kebutuhan pasar kerja merupakan salah satu penyebab mengapa produktivitas dan daya saing Indonesia masih tertinggal. Saat ini proporsi pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi di Indonesia hanya sekitar 40,60 persen (Sakernas, Agustus 2019), lebih rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Sementara itu, pekerja masih didominasi dari lulusan SMP ke bawah (57,54 persen atau 72,79 juta orang), sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan sekolah menengah dan tinggi mencapai 8,01 persen. Tenaga kerja handal yang belum tersedia dan keterlibatan industri yang rendah, menyebabkan masih terjadinya *mismatch* antara penyediaan layanan pendidikan, termasuk pendidikan dan pelatihan vokasi, dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini merupakan tantangan bagi sektor pendidikan dan pelatihan itu sendiri.

Program studi yang dikembangkan pada jenjang pendidikan tinggi sendiri juga belum sepenuhnya menjawab potensi dan kebutuhan pasar kerja. Saat ini, mahasiswa aktif dan lulusan perguruan tinggi sebagian besar didominasi oleh program studi sosial humaniora. Sementara itu, jumlah mahasiswa dan lulusan bidang ilmu sains dan keteknikan masih terbatas. Tantangan tersebut berusaha dijawab oleh sektor pendidikan dengan menghadirkan sebuah konsep pendidikan dimana unsur praktik dalam proses pembelajaran dilakukan lebih banyak dibandingkan unsur teori. Pendidikan yang lebih mengutamakan penerapan keilmuan dibanding sisi akademis inilah yang kemudian dikenal dengan istilah pendidikan vokasi.

Kegagalan SDM di negara ini, dilandasi oleh 3 hal pokok yang tidak dapat dihindari yaitu pertama, liberalisasi dan eksklusivitas pendidikan yang menyebabkan sekolah mahal dan angka putus sekolah tinggi. Kedua, sistem pendidikan yang tidak *link and match*, dalam artian pendidikan hari ini lebih menitikberatkan pada kuantitas dan kualitas bukan pada ketrampilan. Ketiga, pembangunan SDM yang tidak menjadi prioritas pembangunan nasional, hal ini dapat dilihat di RPJNP 2004–2025 yang tidak menjadikan pembangunan SDM sebagai skala prioritas. Oleh karena itu untuk mengawali pembangunan SDM Indonesia diperlukan suatu solusi yang baru dalam rangka pembangunan SDM Indonesia. Reformasi di bidang pendidikan menjadi lebih penting lagi yaitu dengan pendidikan yang murah, reformasi sistem pendidikan *dengan link and match, job oriented* dan pengajaran budi pekerti. Dan realokasi pengelolaan iklim tenaga kerja dan revitalisasi pendidikan dan latihan SDM dengan cara pembangunan infrastruktur baik fisik dan non fisik, regulasi tenaga kerja dan perbaikan bangunan hubungan industrial, serta menjadikan pembangunan SDM menjadi prioritas program pembangunan nasional. Bangunan SDM baru melalui solusi tersebutlah di harapkan mampu mengantar Indonesia menuju Visi Indonesia 2030 dengan SDM yang siap dan berdaya saing.

Tuntutan perubahan era global telah menjadikan pendidikan vokasi memiliki peran strategis dan berada di garda terdepan dalam penanganan usia angkatan kerja. Pendidikan vokasi diprogramkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki penguasaan IPTEK, mandiri, terampil dan terlatih sesuai dengan tuntutan dunia industri atau dunia kerja. Hasil pembelajaran tersebut diperlukan sebagai modal dalam menghadapi persaingan regional maupun global. Secara khusus juga akan mampu menjawab tantangan yang muncul karena adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Pada saat pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diberlakukan, lebih banyak tenaga kerja yang saling berkompetisi untuk merebut lapangan kerja di antara negara-negara ASEAN, terutama tenaga kerja lokal di negara itu sendiri. Tentu bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja tinggi, mempunyai kesempatan lebih luas dalam mendapatkan keuntungan ekonomi dengan adanya MEA. Kualitas SDM harus ditingkatkan baik secara informal, baik di dalam negeri maupun global untuk mencegah meluapnya tenaga kerja terampil dari luar yang masuk ke dalam negara kita. Pekerjaan ini tidaklah mudah karena harus memerlukan adanya sistem pendidikan secara menyeluruh dan sertifikasi berbagai profesi.²

Kebutuhan tenaga kerja di era revolusi industri 4.0 dengan adanya potensi disrupsi dan terciptanya jenis pekerjaan baru akibat dari berkembangnya teknologi digital dan otomatisasi di dunia industri. Pada tahun 2016 kebutuhan tenaga kerja terampil hanya berkisar 30%, namun akan terus terjadi peningkatan kebutuhan tenaga terampil sampai 90% pada tahun 2045 nanti. Dengan tren digitalisasi dan otomatisasi, akan ada perubahan pada pekerjaan atau peran dan terjadi pergeseran keterampilan pada tahun 2025 kelak setidaknya terdapat 10 pekerjaan dapat diotomatisasi dan 10 pekerjaan baru yang muncul dan dibutuhkan. Lompatan revolusi industri memastikan bahwa lapangan kerja pada tahun 2025 kelak merupakan kombinasi antara manusia dan mesin, artinya pekerjaan administratif atau operasional atau berulang akan digantikan oleh teknologi nantinya.³

² Setyoko. *Peran Pendidikan Tinggi Vokasi Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal Orbith Vol. 11 No. 2 (Juli 2015). Hlm. 122.

³ Moerdijat Lestari. *Kondisi Dan Rekomendasi Kebijakan Pendidikan Vokasi* diakses dari <https://lestarimoerdijat.com/pustakalestari/read/2020/09/11/949/Kondisi-dan-Rekomendasi-Kebijakan-Pendidikan-Vokasi>. Pada tanggal 27 Februari 2020

Pendidikan tinggi vokasi merupakan pendidikan yang di dalamnya memuat kurikulum yang peka terhadap berbagai keperluan tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan dalam suatu dunia industri. Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan salah satu pendidikan vokasi di Indonesia yang menyiapkan lulusannya untuk siap bekerja dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta diharapkan dapat berwirausaha (Indriaturrahi dan Sudiyatno, 2016). Reorientasi pendidikan vokasi di Indonesia menuntut pengkajian yang mendasar dan tuntas, sehingga mampu memberikan rumusan asas dan prinsip dasar pengembangan pendidikan kejuruan yang relevan. Diperlukan adanya rumusan yang mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan manajemen sekolah vokasi dalam mendukung pelaksanaan peran strategis pendidikan vokasi.

Tuntutan perubahan ini mengandung implikasi pada perubahan pendekatan pembelajaran, reformulasi peran pendidik dan mahasiswa, pendekatan pengembangan media pendidikan vokasi, evaluasi pembelajaran, yang semuanya memerlukan pengkajian dan penelitian yang mendasar, sistematis, serta berkesinambungan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan tinggi vokasi yang diharapkan.

Sistem pendidikan tinggi vokasi sebenarnya telah membantu para pemuda pengangguran dan pencari kerja dalam mengurangi beban pendidikan tinggi, menarik investasi luar negeri, meyakinkan penghasilan dan pekerjaan yang meningkat serta menekan kesenjangan di antara kaum kaya dan kaum miskin (Gill, Dar, Fluitmn, & Ran, 2000).

Namun banyak catatan bahwa harapan-harapan ini masih sebagai impian dibandingkan sebagai kenyataan.⁴

Sedangkan pada tingkat pendidikan tinggi vokasi sendiri perlu mampu memberikan kontribusi pada daya saing ekonomi, melalui peningkatan *hardskill*, *softskill*, dan peningkatan penggunaan teknologi. Diperlukan penguatan pada lulusan pendidikan vokasi dengan memberikan *skill-up* berupa pelatihan untuk *fresh graduate* agar lebih siap memasuki dunia kerja. Selain itu, saat ini kerjasama antara industri dengan politeknik atau sekolah vokasi masih belum maksimal. Peneliti mengutip beberapa bagian dari pernyataan Patdono Suwignjo, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbudristek menurutnya, kelemahan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia merupakan kesalahan para *stakeholder* dalam mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia.⁵

Kesalahan mendasar pertama adalah adanya *misinterpretasi* di masyarakat, yakni lulus dari akademi lebih terjamin dibandingkan lulus dari politeknik atau sekolah vokasi. Saat ini ada sebanyak 92% mahasiswa di Indonesia yang lulusan dari universitas, padahal kebutuhan dunia kerja untuk lulusan universitas hanya 15-20%. Jumlah mahasiswa politeknik dan sekolah vokasi di Indonesia hanya sebanyak 8,9%. Di semua negara yang industri dan ekonominya maju seperti Jerman, Belanda, Swiss, Australia, Austria dan Selandia Baru, jumlah mahasiswa politeknik dan sekolah vokasi lebih banyak dari jumlah mahasiswa akademi. Di Austria misalnya, mahasiswa vokasi mencapai 72%.

⁴ Sudira Putu. *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*. UNY Press, Yogyakarta, 2012 . hlm 28.

⁵ Wawancara dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbud, 18 Februari 2020 di Kantor Kemendikbud. Jakarta.

Kesalahan kedua, dosen vokasi untuk menjadi professor perlu di evaluasi dengan aturan yang sama dengan dosen akademik, seperti menghasilkan publikasi internasional terindeks *scopus*, semestinya bisa karya praktis yang monumental.⁶ Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan dosen harus berpendidikan S-2. Hal ini menyulitkan para praktisi dan para ahli dari industri yang pada umumnya berpendidikan S-1 atau dibawahnya untuk masuk dan berperan dalam proses pendidikan di Lembaga Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi.⁷

Kesalahan ketiga, belum memberi bobot besar pada kebutuhan industri. Politeknik atau sekolah vokasi yang dinilai bagus adalah politeknik yang bekerjasama dengan industri. Pada tahun 2017, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, membuat aturan politeknik atau sekolah vokasi harus memiliki *partner* industri untuk tiga hal. *Pertama*, merevisi kurikulum, karena yang tau kompetensi yang dibutuhkan oleh industri adalah “orang” industri itu sendiri. *Kedua*, mulai pada tahun 2020 dosen di politeknik dan sekolah vokasi minimum 50% dari industri. Dan yang *ketiga*, industri diperlukan untuk magang. Selain itu adanya *retooling* dari dosen vokasi, jika sebelumnya berfokus pada infrastruktur, sekarang fokus kepada SDM. Industri Indonesia tidak akan kompetitif jika *supply* lulusan vokasi tidak banyak.⁸

Kondisi lulusan pendidikan vokasi, (a) Kondisi ketenagakerjaan masih terjadi *mismatch* yang tinggi antara kebutuhan dan ketersediaan *skill* tenaga kerja; (b) Jumlah lulusan vokasi banyak tapi tidak cukup banyak yang memiliki kompetensi yang diminta oleh

⁶ Wawancara dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbud, 18 Februari 2020 di Kantor Kemendikbud. Jakarta.

⁷ UUD Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

⁸ UUD Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

pelaku usaha; (c) Masih terbatasnya jumlah Lembaga Serfitikasi Profesi Vokasi dibandingkan dengan jumlah politeknik/sekolah vokasi; (d) Persentasi daya serap tenaga kerja pada sektor usaha hotel berbintang terdiri dari tenaga kerja berpendidikan SMK mencapai 59,3%, D-1, 0-2 dan 0-3 mencapai 24,96%; (e) Pendidikan vokasi yang ada belum mampu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan bidang yang dibutuhkan di industri khususnya bidang pariwisata.⁹

Kemudian, sistem pendidikan tinggi vokasi belum sepenuhnya bersinergi dengan industri. Sehingga diperlukan adanya kebijakan implementasi sistem ganda atau *dual system* artinya bekerja sambil sekolah. Di negara maju, pada tahun ketiga siswa masuk dalam produksi di industri. Dengan demikian ketika lulus mereka sudah memiliki kompetensi termasuk *soft skill*. Namun DUDI (dunia usaha dan dunia industri) masih memandang bahwa kualitas pendidik atau dosen di pendidikan tinggi vokasi masih terbilang rendah.

Saat ini yang juga terjadi dilapangan yaitu: (a) Adanya perbedaan penilaian antara Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI); (b) Pelaksanaan magang hanya berkaitan dengan pekerjaan administratif; (c) Dunia usaha dunia kerja berkolaborasi dengan lembaga pendidikan kejuruan/vokasi mulai dari penyusunan bidang keahlian/program studi sampai dengan materi belajar; (d) Dunia usaha dunia kerja dan lembaga pendidikan bekerja sama membuat skema pemagangan; (e) Dunia usaha dunia kerja memberikan dukungan pada lembaga pendidikan seperti penyediaan tenaga pengajar sesuai kebutuhan kompetensi.

⁹ Wawancara dengan Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi Kemendikbud, 18 Febuari 2020 di Kantor Kemendikbud. Jakarta.

Kurikulum semestinya dirancang bersinergi antara pemerintah, industri dan pendidikan. Sinergi dilakukan untuk penyusunan kurikulum yang *link and match* antara lembaga pendidikan dengan industri, materi kurikulum yang selalu diperbarui sesuai kebutuhan industri serta memuat kompetensi yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri. Menurut *Clarke (2007)* terdapat perbedaan tujuan antara dunia pendidikan dengan lapangan kerja/dunia industri karena sekolah hanya menginginkan lulusan yang memiliki nilai tinggi dalam waktu cepat sedangkan di dunia industri menginginkan lulusan berkompeten teknis dan sikap kerja yang baik.

Para pembuat kebijakan perlu mengikutsertakan industri untuk terlibat dalam proses pendidikan, khususnya dalam menyusun kurikulum agar kompetensi capaian dalam kurikulum selaras dengan kebutuhan, menekankan pentingnya inovasi di era revolusi industri sesuai perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, diperlukan keterlibatan antara publik-swasta-masyarakat, pola pikir yang baru, pengembangan jaringan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan dosen dan mahasiswa, serta pemanfaatan teknologi.

Revolusi industri 4.0 berpengaruh pada kebutuhan tenaga kerja yang kompeten untuk berbagai bidang pekerjaan (Buasuwan, 2018). Hal ini jelas berkaitan dengan pendidikan vokasi sebagai pencetak lulusan siap kerja. Kurikulum, perangkat pembelajaran, sarana dan prasarana, pola pembelajaran hingga peranan pengajar perlu mengalami *rethinking* dan *redesign*. Tantangan yang terjadi pada revolusi industri 4.0 menuntut agar pendidikan vokasi menghasilkan lulusan yang mampu bekerja dalam konteks saat ini dan masa depan. Oleh sebab itu perlu ada upaya *re-alignment* kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan tenaga kerja era revolusi industri 4.0.

Seperti pemerintahan negara-negara lain di dunia, pemerintah Indonesia mengharapkan sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan dapat mewujudkan prestasi yang tidak bisa dilakukan oleh sistem pendidikan umum. Pemerintah akan meningkatkan pelatihan jika suplai tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang cepat, pekerjaan tumbuh dengan pesat, atau jika pengangguran meningkat secara signifikan. Pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah untuk menyiapkan pekerja memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pekerjaan (Chinien, C.and Singh, M., 2009; Rychen, D.S., 2009; Singh, M.,2009; Pavlova, M., Maclean, R., 2009)¹⁰

Dari latar belakang diatas, penelitian ini berangkat dari pemikiran tentang bagaimana pendidikan tinggi vokasi seharusnya menempatkan diri dan mengambil kebijakan guna meningkatkan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ini. Dengan demikian, pendidikan tinggi vokasi diharapkan dapat memberi kontribusi nyata dalam upaya pencapaian program pemerintah untuk menjadikan Indonesia Maju dengan cara menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. SDM unggul inilah yang nantinya akan memenangkan kompetisi dan pada akhirnya dapat membawa Indonesia menjadi pemenang di era persaingan global. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana kesiapan pendidikan tinggi vokasi sehingga tidak terlena dengan kesan seolah-olah semua sudah baik dan siap padahal kata vokasi hanya menjadi label yang disematkan di lembaga pendidikan hanya agar lulusannya bisa segera diterima bekerja tetapi tanpa kompetensi yang memadai sebagaimana diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

1.2 Rumusan Masalah

¹⁰ Sudira Putu. *Filosofi dan Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan*. UNY Press, Yogyakarta, 2012 . hlm 28.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 ?
2. Sejauh mana kesiapan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia ?
3. Apa tantangan dan hambatan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia di era revolusi industri 4.0 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. Mengetahui kesiapan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia itu sendiri serta untuk dapat mengetahui apa saja tantangan dan hambatan kondisi pendidikan tinggi vokasi di Indonesia saat ini. Kemudian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan riil tentang hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasi itu sendiri. Secara khusus dalam menghadapi kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0, pendidikan tinggi vokasi harus terus berbenah diri. Untuk itulah maka diperlukan kajian-kajian relevan yang mungkin dapat dijadikan sebagai pedoman langkah ke depannya.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam dan tentunya tidak hanya sekedar menjadi penambah bahan pustaka tentang pendidikan tinggi vokasi atau mendukung penelitian-penelitian terdahulu saja tetapi semoga juga dapat diaplikasikan di masyarakat.

Selain itu, secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai perkembangan kurikulum pendidikan khususnya tentang pendidikan vokasi. Diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang ada kaitannya dengan pendidikan vokasi. Secara praktis bagi lembaga pendidikan, dapat memberikan bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan vokasi.

1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yaitu salah satu bagian tahapan yang penting serta wajib untuk diperhatikan oleh peneliti sebab teori-teori yang digunakan berisi penjelasan atau sesuatu yang bias untuk menyebutkan mengenai suatu kenyataan atau suatu sistem yang mendiskusikan bagaimana sebuah kenyataan tersebut dapat beroperasi dan mengapa kenyataan tersebut dapat terjadi.

Tinjauan atau studi pustaka pada dasarnya berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka dijadikan sebagai bahan perbandingan sekaligus referensi bagi peneliti dalam mengkaji tentang perkembangan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, maka peneliti meninjau referensi dari penelitian yang dianggap cukup relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti memiliki relevansi. Dari penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian yang akan dilakukan sekarang, namun peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu memiliki jenis dan garis besar penelitian yang sama.

1.4.1 Jurnal : Tantangan Revolusi Industri Ke-4 (4.0) Bagi Pendidikan Vokasi.

Peneliti: Moch Bruri Triyono. Universitas Negeri Yogyakarta.¹¹

Jurnal ini menjelaskan bahwa perubahan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan sudah mulai terlihat perubahannya akibat revolusi industri ke empat (i4.0). Revolusi industri ke-4 mempunyai ciri teknologi yang menyatu dengan masyarakat dan tubuh manusia, robotik, *quantum* komputasi, bioteknologi, *3D printing*, otomasi kendaraan, internet, sistem virtual dan fisik bekerjasama yang secara global. Kondisi ini akan memengaruhi kinerja pendidikan vokasi yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja, khususnya dalam hal pengembangan kurikulum, penyesuaian perangkat pembelajaran dan kesiapan berubah para pendidiknya. Perubahan dalam pembelajaran sesuai dengan era i4.0 akan berdampak pada peran pendidikan vokasi khususnya peran pendidiknya. Jika peran pendidik masih mempertahankan sebagai penyampai pengetahuan, maka mereka akan kehilangan peran seiring dengan perkembangan teknologi dan perubahan metode pembelajarannya. Kondisi tersebut harus diatasi dengan menambah kompetensi pendidik yang mendukung pengetahuan untuk eksplorasi dan penciptaan melalui pembelajaran mandiri. Definisi kompetensi baru harus segera ditemukan melalui penelusuran dan penelitian tentang tujuh domain dalam kompetensi mengajar guru vokasi. Pelaku pendidikan vokasi harus belajar cepat

¹¹ Moch Bruri Triyono. "Tantangan Revolusi Industri Ke 4 (4.0) Bagi Pendidikan Vokasi". *Jurnal Seminar Nasional Vokasi dan Teknologi (SEMNASVOKTEK)*. 2017

berubah untuk bekerjasama dengan industri dan mengenali kompetensi baru seperti apa yang dibutuhkan oleh industri melalui pemanfaatan berbagai data. Selain itu, pendidik harus mengembangkan keahliannya sendiri termasuk bagaimana mengelola data peserta didik, bimbingan karir melalui pemanfaatan *big-data*, sehingga pendidik dan peserta didik dapat segera beradaptasi terhadap perubahan i4.0.

1.4.2 Jurnal : Kurikulum Pendidikan Vokasi Pada Era Revolusi Industri 4.0. Peneliti: Nizwardi Jalinus dan Lise Asnur. IKIP PGRI Pontianak dan Universitas Negeri Padang.¹²

Pada jurnal ini pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menghasilkan lulusan siap kerja yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Memasuki era revolusi industri 4.0 terjadi perubahan yang masif pada berbagai industri dan kebutuhan kemampuan pekerja. Artikel ini bermaksud mengkaji implikasi era revolusi industri 4.0 bagi kurikulum pendidikan vokasi. Berdasarkan kajian berbagai sumber dan praktek bisnis, diperlukan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan era revolusi industri 4.0 dan relevan menjawab kebutuhan keterampilan baru, seperti kemampuan membuat dan mengelola *coding*, *big data*, dan *artificial intelligence*. Kurikulum vokasi perlu menerapkan pembelajaran *blended learning*, yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan online, supaya lebih efektif membangun kemampuan dan ketrampilan lulusan. Kurikulum juga perlu memuat penguasaan kompetensi i4.0 seperti literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. Agar kurikulum pendidikan vokasi menghasilkan dampak yang luas, pemerintah, lembaga pendidikan, industri harus bersinergi untuk merevitalisasi

¹² Unung Verawadina, Nizwardi Jalinus, Lise Asnur. "Kurikulum Pendidikan Vokasi Pada Era Revolusi Industri 4.0". Jurnal Pendidikan, Vol, 20, Nomor 1. (Maret 2019)

pendekatan dan isi kurikulum pendidikan vokasi. Pengajar juga harus dapat menyelenggarakan pembelajaran yang baik untuk menghasilkan kinerja optimal lulusan.

Penelitian jurnal ini menyatakan bahwa memasuki era revolusi industri 4.0 dapat memberi dampak pada lembaga pendidikan, khususnya pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sebagai lembaga mencetak lulusan yang siap kerja harus memperhatikan kebutuhan industri saat ini. Kurikulum pendidikan vokasi dituntut selalu beradaptasi dengan perubahan kondisi, teknologi, dan tuntutan dunia kerja. Kurikulum perlu mengintegrasikan kompetensi dan literasi baru yang relevan dengan dunia kerja era revolusi industri 4.0. Model dan modus pembelajaran juga perlu fleksibel, menerapkan pembelajaran tatap muka maupun yang berbasis teknologi informasi untuk membangun peserta didik menjadi pembelajar mandiri. Dalam paradigma baru ini peran pengajar tetap strategis sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran, lebih berperan sebagai fasilitator dan motivator supaya peserta didik aktif dalam proses belajar yang efektif dan optimal. Untuk menyusun kurikulum pendidikan vokasi era revolusi industri 4.0 diperlukan sinergi yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan industri untuk merevitalisasi kurikulum tersebut.

1.4.3 Jurnal : Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Peneliti: Cahya Fajar Budi Hartanto, Rusdartib dan Abdurrahman. Universitas Negeri Semarang dan Politeknik Bumi AKPELNI.¹³

¹³ Cahya Fajar Budi Hartanto, Rusdartib dan Abdurrahman. "Tantangan Pendidikan Vokasi di Era Revolusi Industri 4.0 dalam Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Unggul". Seminar Nasional Pascasarjana UNNES. 2019

Jurnal ini menjelaskan bahwa sebenarnya pendidikan vokasi kita sudah baik tetapi masih ada celah untuk melakukan perbaikan. Beberapa hal yang masih menjadi titik lemah pendidikan vokasi di Indonesia adalah kebutuhan akan tenaga pendidik yang berkualitas, kelengkapan sarana prasarana yang menyerupai atau bahkan sama dengan yang digunakan oleh industri, kurikulum yang harus terus disesuaikan dengan perubahan jaman, dan pembekalan karakter bagi lulusan agar memiliki *soft skills* yang diharapkan oleh industri. Hasil dari penelitian ini yaitu penelitian yang mendalami tentang bagaimana seharusnya lembaga pendidikan vokasi melaksanakan perannya secara optimal dalam mempersiapkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pendidikan vokasi untuk menjawab tuntutan yang semakin hari semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka melalui pendalaman literatur dan hasil penelitian terdahulu. Penelitian bermaksud menjawab dua pertanyaan yaitu bagaimana realita kondisi pendidikan vokasi saat ini dan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi seperti peningkatan kompetensi dosen vokasi, penguatan sinergi dan kolaborasi *pentahelix*, revitalisasi pendidikan vokasi dengan penambahan *teaching factory*, *rebranding* melalui studi langsung ke industri dan studi banding ke lembaga pendidikan yang sudah lebih maju baik di dalam maupun luar negeri, serta penambahan karakter pada peserta didik. Dengan demikian, harapannya, pendidikan vokasi dapat berperan serta secara nyata dalam upaya pencapaian program pemerintah

untuk menjadikan Indonesia maju dengan cara menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.

Penelitian jurnal ini, peneliti memberikan beberapa rekomendasi yaitu kebutuhan akan tenaga pendidik yang berkualitas harus dijawab dengan peningkatan kompetensi dosen vokasi yang dilaksanakan secara berkesinambungan. Kebutuhan kelengkapan sarana prasarana praktek/praktikum dapat diupayakan dengan penguatan sinergi dan kolaborasi pentahelix serta revitalisasi pendidikan vokasi dengan penambahan *teaching factory*. Untuk penyesuaian kurikulum, dapat dilakukan *rebranding* melalui studi langsung untuk melihat kebutuhan SDM di industri atau melalui studi banding ke lembaga pendidikan yang sudah lebih maju baik di dalam maupun luar negeri. Adapun terkait karakter atau *soft skills*, pendidikan vokasi harus terus berupaya melakukan pembinaan karakter pada peserta didiknya misalnya dengan mendatangkan para pakar kepribadian atau memanfaatkan kerjasama dengan industri untuk menghadirkan bagian personalia di perusahaan terkait agar dapat menyampaikan secara langsung di hadapan peserta didik tentang bagaimana kebutuhan tenaga kerja sesungguhnya, khususnya terkait dengan karakter yang dibutuhkan.

Adapun keterbatasan penelitian ini adalah penilaian ini belum secara kuantitatif dalam melakukan penilaian terkait kesiapan pendidikan vokasi Indonesia dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 serta terkait hasil lulusan yang dapat disebut berkualitas unggul.

1.4.4 Jurnal : Link And Match Sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan Dan Vokasi.

Peneliti : Eka Prohatin Disas. Universitas Pendidikan Indonesia.¹⁴

Jurnal ini mengatakan *Link and Match* (keterkaitan dan kesepadanan) sebagai keluaran dari sebuah kebijakan, merupakan konsep keterkaitan antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja, atau dengan kata lain *link and match* ini adalah keterkaitan antara pemasok tenaga kerja dengan penggunaannya. Dengan adanya keterkaitan ini maka pendidikan sebagai pemasok tenaga kerja dapat mengadakan hubungan-hubungan dengan dunia usaha/industri.

Adapun pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan *link and match* adalah pendekatan sosial dan pendekatan ketenagakerjaan. Pendekatan sosial merupakan pendekatan yang didasarkan atas keperluan masyarakat yang mana pendekatan ini menitik-beratkan pada tujuan pendidikan dan pemerataan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Sedangkan, pendekatan ketenagakerjaan merupakan pendekatan yang mengutamakan kepada keterkaitan lulusan sistem pendidikan dengan tuntutan terhadap tenaga kerja pada berbagai sektor pembangunan dengan tujuan yang akan dicapainya yaitu pendidikan itu diperlukan untuk membantu lulusan dalam memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik sehingga tingkat kehidupannya dapat diperbaiki.

Sesungguhnya banyak upaya peningkatan *link and match* yang telah dilakukan dengan benar, namun karena upaya tersebut kurang komprehensif, konsisten, dan terukur serta tidak ditopang oleh hukum yang jelas, maka upaya ini kembali terhilas bersarnya masalah yang muncul. Nampaknya strategi peningkatan *link and match*

¹⁴ Eka Prohatin Disas. "Link And Match Sebagai Kebijakan Pendidikan Kejuruan Dan Vokasi." Jurnal Penelitian Pendidikan. 2018.

yang efektif adalah perlunya payung hukum beserta sanksinya yang mengatur terjaminnya efektivitas hubungan interaksi secara terukur, menyeluruh dan berkelanjutan antara dunia pendidikan tinggi, industri dan pemerintah dalam menangani masalah *link and match* ini. Untuk menyusun strategi jangka panjang yang rinci dan komprehensif tentu masih diperlukan penelitian besar yang mendalam dengan lingkup yang memadai.

Tantangan yang dihadapi pemerintah dan tentunya masyarakat Indonesia adalah MEA, yang memungkinkan persaingan tenaga kerja secara bebas sesama anggota ASEAN. Oleh karena itu untuk menjawab tantangan MEA dalam menciptakan tenaga terampil dalam dunia industri yakni mulai dengan pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi dengan strateginya yaitu kebijakan *link and match* tersebut, sehingga bagaimana industri yang berada di Indonesia untuk setidaknya merekrut SDM dalam negeri yang tentunya sudah terampil dan memiliki *skill* yang telah dibentuk dari kebijakan-kebijakan pendidikan kejuruan dan vokasi yang telah ditempuh demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau *instrument* untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Menurut Heinz Eulau dan Kenneth Prewith (1973), kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi *reward* dan *sanctions*. Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.¹⁵

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where, dan how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena

¹⁵ Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 20.

kalau tidak ada implementasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dicanangkan pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.¹⁶

Dengan pendekatan-pendekatan prosedural dan manajerial (*procedural and managerial approaches*) mengemukakan tahap implementasi mencakup urutan langkah sebagai berikut :¹⁷

1. Merancang bangun (mendesain) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, biaya dan waktu;
2. Melaksanakan program, dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana dan sumber-sumber, prosedur-prosedur, dan metode-metode yang tepat;
3. Membangun sistem penjadwalan, *monitoring*, dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna menjamin bahwa tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera dilaksanakan.

Dari rangkaian tahap diatas, secara garis besar implementasi kebijakan meliputi kegiatan perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan. Kemungkinan, terjadi ketidak-efektifas kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah. Menjelaskan suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya

¹⁶ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan* Negara, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hal. 5-7.

¹⁷ *Ibid*, Hal. 112.

perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai sebagai hasil atau prestasi pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut tergantung pada kemampuan organisasi atau aktor untuk mengimplementasikan kebijakan yang dipercayakan sedemikian rupa, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen kebijakan tercapai (*implementation capacity*).¹⁸

Dengan implementasi kebijakan diharapkan tercapai perubahan sesuai yang direncanakan. Namun demikian kemungkinan akan terjadi penolakan terhadap perubahan sehubungan dengan implementasi kebijakan tersebut. Ragam pelaksanaan implementasi kebijakan menurut peneliti tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik seperti di eksekutif, anggota legislatif, yudikatif, kelompok-kelompok kepentingan yang berpengaruh pada jalannya roda perekonomian, dan warga masyarakat sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat. Dengan demikian kebijakan publik menjadi efektif, bilamana dilaksanakan dan mempunyai dampak baik diharapkan maupun tidak bagi kelompok sasaran khususnya, dan anggota masyarakat pada umumnya.

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan, istilah-

¹⁸ Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hlm. 61.

istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan pengawasan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.¹⁹

Ada lima hal yang berhubungan dengan kebijakan publik. *Pertama*, tujuan atau kegiatan yang berorientasi tujuan haruslah menjadi perhatian utama perilaku acak atau peristiwa yang tiba-tiba terjadi. *Kedua*, kebijakan merupakan pola model tindakan pejabat pemerintah mengenai keputusan-keputusan diskresinya secara terpisah. *Ketiga*, kebijakan harus mencakup apa yang nyata pemerintah perbuat, atau apa yang mereka katakan akan dikerjakan. *Keempat*, bentuk kebijakan publik dalam bentuknya yang positif didasarkan pada ketentuan hukum dan kewenangan. *Kelima*, tujuan kebijakan publik adalah dapat dicapainya kesejahteraan masyarakat melalui produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.²⁰

¹⁹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011, Hlm. 38.

²⁰ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011, Hlm. 40-41

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran, melahirkan sebuah rekomendasi yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan dari kebijakan tersebut. Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut :²¹

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni :
 - a. Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan
 - b. Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - c. Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-*

²¹ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta Pusat, Pustaka Indonesia Press, 2011, Hlm.41

down dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.

3. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*). Ketidadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (*unintended results*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.

6. Kebijakan kebanyakan di definisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya ditetapkan oleh dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.
9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.

10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktub dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut.

Kebijakan publik seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 4 dan Pasal 6 terdapat:

(a) kelebihan: (1) setiap penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut. (b) kelemahan: (1) meskipun menganut Undang-Undang tersebut masih banyak terjadi kasus diskriminasi karena agama; (2) masih banyak anak yang tidak bersekolah karena faktor biaya. (c) peluang: (1) menciptakan peserta didik yang toleransi; (d) tantangan: karena banyak berkembangnya paham radikalisme di Indonesia itu menjadi salah satu tantangan dalam menerapkan pluralisme Menurut *The Oxford Dictionary* dalam Kumbara (2019:531) menyatakan bahwa pluralisme sebuah teori menentang kekuasaan pemerintah homogen, dengan mendukung desentralisasi.

Solusi: (1) pemerataan kesejahteraan terhadap penduduk agar bisa mengakses pendidikan; (2) penanaman pendidikan karakter; (3) menanamkan sikap saling toleransi.

1.5.2 Politik Pendidikan

Politik pendidikan adalah penggunaan kekuasaan untuk memaksakan kebijakan pemerintah agar bisa dilaksanakan dalam kebijakan pendidikan. Kemudian kebijakan

politik pendidikan dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan dan efektifitasnya. Evaluasi politik pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan mengkaji berbagai kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan politik pendidikan dan apa dampaknya terhadap suatu persoalan.

Secara umum, masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah/harus dipisahkan dari dunia politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu, melainkan untuk semuanya (Wirt & Kirst, 1982). Pendidikan dan politik adalah dua elemen yang erat hubungannya dan dinamis di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.²² Sementara itu dunia politik lebih menekankan pada kepentingan-kepentingan jangka pendek dan lebih mementingkan konstituan (kelompoknya). Platform politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikhawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling berinterseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan.²³

²² Jumani. Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015. Hlm. 181.

²³ Slamet PH. Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Thn. XXXIII,

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, peran gubernur dan bupati/walikota terutama dalam alokasi/penempatan kepala dinas pendidikan sangat dominan sehingga sulit menjamin mutunya. Beruntung telah terbit UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana rekrutmen dan seleksi kepala dinas pendidikan tidak lagi didominasi gubernur dan bupati/walikota, tetapi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (lembaga non-struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik).

Jadi, politik pendidikan adalah suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka memengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan.

Dalam ungkapan Albernethy dan Coombe (M. Sirozi, 2007), *Education and politics are inextricably linked* (pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan), menurut mereka hubungan timbal-balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*group attitudes*), masalah pengangguran (*employment*), peranan politik kaum cendekia (*the political role of the intelligentia*). Kesempatan dan prestasi pendidikan pada suatu kelompok masyarakat, menurut mereka dapat mempengaruhi akses kelompok tersebut dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi. Perbedaan signifikan antara berbagai kelompok masyarakat

yang disebabkan oleh perbedaan pendidikan dapat dilihat pada distribusi kekuasaan politik dan ekonomi serta kesempatan kerja, khususnya pada sektor pelayanan publik²⁴

Pendidikan Indonesia dalam abad ke-21 dihadapkan pada pilihan-pilihan akibat perubahan-perubahan lingkungan strategis yang kompleks, sukar diprediksi, labil, tidak pasti, turbulen, dan keterbatasan sumber daya pendidikan. Oleh karena itu, politik pendidikan harus hadir agar pendidikan Indonesia tidak terbawa arus perubahan lingkungan strategis yang tidak menguntungkan Indonesia. Mengingat mozaiknya tekanan-tekanan dan tuntutan-tuntutan lingkungan strategis, maka diperlukan ketegasan arah politik pendidikan Indonesia. Berbicara politik pendidikan berarti mendekati pendidikan dengan politik sebagai takaran/tolok ukurnya. Tolok ukur politik pendidikan suatu negara sangat tergantung pada ideologi dan konstitusi suatu negara. Negara-negara barat yang berideologi ekonomi kapitalisme dan politiknya demokrasi liberal, maka politik pendidikannya jelas mengarah kepada pembangunan generasi muda yang kapitalistik dan liberalistik.²⁵

Untuk Indonesia, Pancasila merupakan ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) merupakan konstitusi sehingga politik pendidikannya pun harus berpijak pada Pancasila dan UUD 45. Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika merupakan pilar-pilar kebangsaan, maka pembangunan pendidikan Indonesia harus menanamkan nilai-nilai patriotisme untuk membela NKRI dan menanamkan nilai-nilai toleransi berbasis perdamaian dan

²⁴ Jumani. Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015. Hlm. 182

²⁵ Slamet PH. Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Thn. XXXIII, No. 3. Hlm. 326.

kerukunan yang diamalkan dalam bentuk kesolehan sosial. Di samping itu, Indonesia kaya akan sumber daya manusia, natural, kultural, dan sosial. Oleh karena itu, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia, yaitu pembangunan pendidikan yang benar-benar mendasarkan pada kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Pendidikan Indonesia harus mencurahkan perhatiannya terhadap kespesifikan lokal (daerah) seraya memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan regional serta internasional.

Di Indonesia, kepedulian terhadap hubungan pendidikan dan politik sudah mulai berkembang dalam wacana publik, walaupun belum menjadi satu bidang kajian akademik. Publikasi yang menggunakan tema pendidikan dan politik belum tampak kepermukaan. Kalaupun ada, fokus bahasannya belum begitu menyentuh aspek-aspek ideologis politik pendidikan. Akan tetapi keyakinan akan adanya hubungan yang erat antara pendidikan dan politik tampaknya sudah mulai tumbuh.

Fungsi politik pendidikan secara khusus juga dapat diaktualisasikan melalui proses pembelajaran. Menurut Massialas (M. Sirozi, 2007), proses pembelajaran bisa bersifat kognitif (misalnya, mendapatkan pengetahuan dasar tentang suatu sistem), bisa bersifat afektif (misalnya, mengetahui sikap-sikap positif dan negatif terhadap penguasa atau simbol-simbol), bisa bersifat *evaluative* (misalnya, penanaman rasa ingin berpartisipasi). Sebagian besar unsur-unsur pembelajaran tersebut dirancang dan diarahkan sedemikian rupa untuk memenuhi tuntutan politik tertentu.²⁶

²⁶ Jumani. Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015. Hlm. 182

Tujuan politik pendidikan adalah untuk mengetahui dan menyamakan standarisasi kualitas pendidikan nasional di Indonesia. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai negara dengan tingkat geografis yang berbeda-beda, maka standarisasi pendidikan nasional harus dilakukan, dalam rangka memberikan dorongan untuk menyamakan pendidikan diseluruh Indonesia.²⁷

Menurut Dale (M. Sirozi, 2007), kontrol negara terhadap pendidikan umumnya dilakukan melalui empat cara, yaitu: pertama, sistem pendidikan diatur secara legal; kedua, sistem pendidikan dijalankan sebagai birokrasi, menekankan ketaatan pada aturan dan obyektivitas; ketiga, penerapan wajib pendidikan (*compulsory education*); keempat, reproduksi politik dan ekonomi yang berlangsung dilembaga pendidikan dalam konteks politik tertentu.

Lebih lanjut Dale (M. Sirozi, 2007), mencatat setidaknya ada tiga problem pokok yang selalu ada dalam agenda sistem pendidikan, yaitu: 1) dukungan langsung terhadap proses akumulasi *capital*; 2) memberikan konteks sosial lebih luas yang tidak saling bertentangan dengan akumulasi *capital* yang berlangsung terus-menerus; 3) legitimasi kegiatan negara dalam sistem pendidikan.²⁸

Implementasi politik pendidikan mengarah pada sebuah hasil dari penggunaan kekuasaan untuk mendesak kebijakan pendidikan yang dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dapat dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk

²⁷ Jumani. Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015. Hlm. 183

²⁸ Jumani. Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015. Hlm. 183

melakukan desakan terhadap pelaksanaan suatu keputusan kebijakan yang diberlakukan. Sebaliknya politik pendidikan lunak dalam menekankan implementasi kekuasaan secara halus (*subtly power*) lewat strategi.²⁹

1.5.3 Ideologi New Developmentalisme

Mula-mula *developmentalisme* adalah salah satu teori pembangunan, tetapi kemudian berkembang menjadi suatu ideologi, sebagaimana disebutkan Tony Smith, pada tahun 1985, setelah teori pembangunan internasional diketahui keberhasilan dan kegagalannya. Ideologi ini timbul dan berkembang menurut versi negara-negara industri maju ataupun dunia ketiga.

Menurut Mochtar Mas'ud (1997:30), salah satu model pendekatan rezim orde baru dalam memerintah adalah pendekatan yang memprioritaskan pertimbangan politik dalam proses pembangunan dan menekankan peranan negara sebagai aktor utama pembangunan. Asumsi dari pendekatan ini adalah kekuatan negara diidentikkan dengan terjaminnya keberlangsungan pembangunan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan (kemakmuran rakyat dan pemerataan). Legitimasi yang disebut terakhir ini dilakukan dengan cara memproduksi sistem ideologi yang memungkinkan negara mempunyai kekuasaan hegemonik. Salah satu ideologi hegemonik orde baru adalah ideologi *developmentalisme* (*developmentalism ideology*).

Konsep pokok *developmentalisme* adalah pembangunan, yaitu penguatan basis material suatu negara, melalui industrialisasi, mengikuti pola yang sangat mirip dari

²⁹ Jumani. Implementasi Politik Pendidikan Dalam Kurikulum 2013. Dewantara, Volume 1 Nomor 2, September 2015. Hlm. 181.

satu negara ke negara lain (Hettne, 2001). Proses meniru yang dilakukan suatu negara dengan melakukan industrialisasi mengakibatkan homogenisasi pembangunan dunia yang menciptakan struktur internasional pusat-pinggiran. Kinerja pembangunan dari suatu negara dapat mengubah struktur pusat-pinggiran tersebut.

Teori *new developmentalisme* cenderung normatif, meskipun ada juga yang didasarkan pada landasan empirik. Namun terlepas dari semua itu, Arif (2000) melihat adanya problema bawaan dalam teori *new developmentalisme*. Problema tersebut mencakup lima hal. (1) Perspektif dependensia ini menjelaskan tentang bentuk ketergantungan negara dunia ketiga pada dunia pertama. Hal ini bisa dibuktikan dari deras nya arus barang dan jasa serta kapital dari negara-negara dunia pertama. penderitaan, keterbelakangan, suburnya ketidakadilan dan kediktatoran militer di negara-negara dunia ketiga, bukan karena adanya sisa-sisa feodalisme atau modernisasi yang salah tempat, melainkan karena tatanan ketergantungan pada kapitalisme. Penjajahan baru negara kaya atas negara miskin sudah bergeser dari model penjajahan fisik dan geografis menuju model yang lebih halus dan tidak kentara, yakni dengan menciptakan ketergantungan negara miskin kepada negara kaya. (2) transformasi ideologi, nilai, dan budaya. Pembangunan dan industrialisasi di negara-negara dunia ketiga bukan hanya dimaknai sebagai kehadiran barang, jasa, teknologi, dan informasi, melainkan juga transformasi nilai modernisasi. Modernisasi ini dipahami sebagai perubahan perilaku tradisional ke perilaku modern. Ini merupakan wujud dari hegemoni negara maju atas negara dunia ketiga. Globalisasi gaya hidup, seperti hedonistik, profit *oriented* dan budaya konsumtif melanda kehidupan masyarakat dunia ketiga. Nilai-nilai modern yang rasionalistik, individualistik, dan

positivistik merasuk ke dalam kehidupan masyarakat dunia ketiga dan berperan meminggirkan nilai-nilai lokal yang kolektivistik, asketis, dan fatalistik. (3) hegemoni pengetahuan. Pengetahuan merupakan alat peredaran perwakilan negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnya yang memajukan kapitalisme. (4) distorsi gender. (Arif, 2000:143)

Ideologi *developmentalisme* sebagai turunan nyata dari sistem kapitalisme memiliki dampak yang luar biasa terhadap Indonesia, yang secara riil mulai dibangun sejak periode Orde Baru. Indonesia adalah pengikut setia ideologi *new developmentalisme*. **Melalui pembangunan ini orde baru berusaha memperoleh *legitimation* rakyat dengan menjanjikan kemakmuran yang akan dicapainya. Sedangkan sosialisasi dan internalisasi ideologi *developmentalisme* ini dilakukan dengan tiga mekanisme yaitu melalui: (a) regulasi; (b) media massa; dan (c) pendidikan/sekolah. (Arianto Nurcahyono, 1999;88). Sehingga ideologi ini kemudian membius kepada hampir seluruh warga negara yang pada gilirannya membentuk sebuah struktur yang menghegemoni terhadap kesadaran warga negara termasuk para pendidik di sekolah.**

Dalam konteks pendidikan, akan dianggap wajar ketika negara melakukan intervensi mulai dari penyusunan kurikulum, penentuan media, pendanaan, sarana prasarana yang harus diacu, cara dan gaya mengajar sampai tipologi lulusan yang harus dihasilkan. Seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat maka kebijakan pendidikan yang semula berfokus kepada penyesuaian diri dan tanggung jawab sosial menjadi fokus kepada upaya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam

melaksanakan pembangunan (*developmental*). Pendidikan menjadi agen pembangunan nasional yang mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, pendidikan yang lebih memberikan ruang gerak untuk manusia berekspresi, menyatakan aspirasinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Demikian juga halnya dengan pendidikan sebagai sebuah ilmu, pendidikan juga memiliki kebijakannya sendiri yang didasarkan kepada landasan filosofis, teori maupun fakta dalam pendidikan dan meskipun pendidikan sebagai sebuah ilmu baru namun kehadirannya saat ini telah menyita perhatian begitu banyak pihak akan pentingnya peran pendidikan bagi kehidupan manusia.

***Deveplomentalisme* atau pembangunanisme menjadi paradigma kebijakan ekonomi dan politik sejak orde baru hingga sekarang. Menyimak dari potret dominasi negara atas pendidikan yang sudah sedemikian kuat, maka pada era reformasi dan era transisi sekarang ini sekolah-sekolah dan kampus memiliki peluang terbuka untuk melepaskan diri dari dominasi kekuasaan politik negara. Sekolah-sekolah dan kampus di Indonesia sekarang ini memerlukan pemberdayaan (*empowerment*) atas segenap sumber yang dimilikinya termasuk pada keberdayaan politik. Upaya paling logis dari gerakan *empowerment* ini adalah dengan cara melanjutkan hal-hal positif yang telah dilakukan sekolah dan kampus dan pada waktu bersamaan dilakukan evaluasi dan identifikasi kembali terhadap segenap sumberdaya yang dimiliki sekolah dan kampus untuk dimanfaatkan secara optimal.**

Sumber daya yang terdapat dalam pendidikan menurut beberapa para ahli meliputi unsur-unsur seperti; kelembagaan, kepemimpinan/ manajerial, tenaga

akademik, sarana prasarana, teknologi pembelajaran, kurikulum dan sumber belajar lain, dana dan anggaran, serta dukungan dari masyarakat. Segenap sumber daya tersebut kemudian dikelompokkan menjadi dua, yaitu; (a) dari perorangan (privat); dan (b) dari masyarakat (sosial), yang keduanya bisa dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung oleh sekolah dan kampus. (Sumarno, 1995:4). Sedangkan khusus sumber daya sekolah/kampus yang berasal dari masyarakat bisa berupa tenaga, keahlian, dana, program kepedulian dan lain-lain dari masyarakat. (Shofyanis, 1996:6).

Salah satu amanat UUD 1945 adalah mencerdaskan bangsa dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut maka UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyatakan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Untuk mencapai hal tersebut maka sejalan dengan kebijakan pendidikan *developmentalism* yang menuntut penguasaan IPTEK dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa maka pada pasal 31 ayat 5 UUD 1945 dikatakan bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka arah kebijakan pembangunan

pendidikan nasional tahun 2010-2014 salah satunya adalah dengan penerapan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk e-pembelajaran dan e-administrasi.

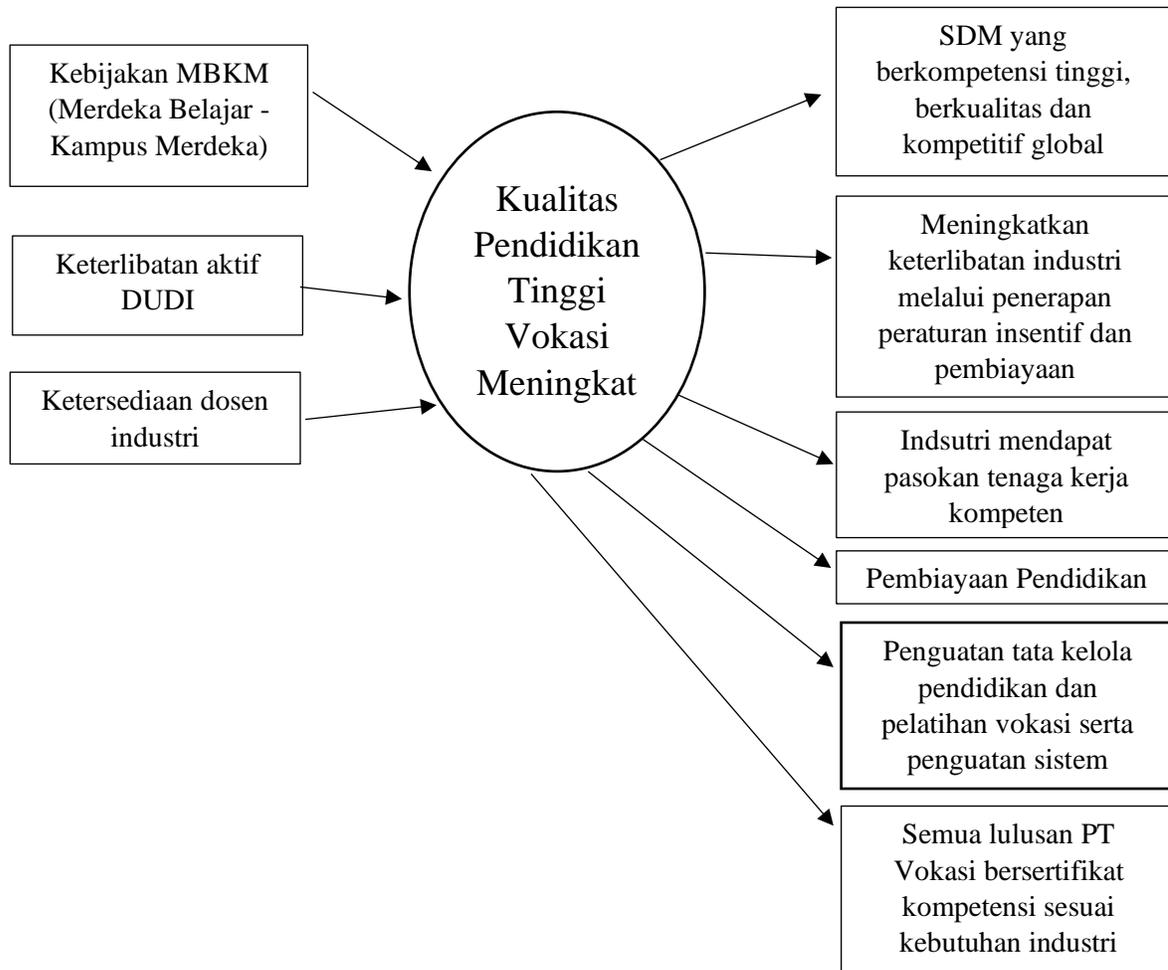
Dengan demikian pendidikan untuk saat ini tidak lagi sekedar berbicara tentang moralitas, watak maupun pendidikan yang teroganisir dan bersifat masal tapi lebih luas lagi bagaimana menjadikan pendidikan sebagai salah satu agen pembangunan (*the agents of development*).³⁰ Sebagai salah satu agen pembangunan maka pendidikan harus mampu memberikan kontribusi positif sekaligus sebagai katalis pembangunan, itulah yang menjadi fokus kebijakan pendidikan *developmentalism*.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis yaitu kerangka berpikir yang sifatnya teoritis atau konseptual permasalahan penelitian. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan tentang konsep yang akan diteliti. Dapat dilihat berdasarkan bagan 1.1 dibawah ini :

³⁰ Bdk. Achmad Sanusi, Fakta, *Kebijakan, Ilmu, Filsafah Pendidikan* (Diktat: Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2010). Hlm.32.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran
(dimodifikasi oleh peneliti)



Kemendikbudristek selalu memperhitungkan tren global terkait kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, pergeseran sosio-kultural, dan perbedaan dunia kerja masa depan. Oleh karena itu Kemendikbudristek melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri dan pemberi kerja, serta masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan kemajuan pendidikan dan kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Keterlibatan industri dalam pengembangan kurikulum dan penguatan kompetensi mahasiswa hanya terbatas pada segelintir perguruan tinggi. Selama ini *trust* atau kepercayaan industri dengan pendidikan tinggi vokasi masih kurang, begitu juga sebaliknya pendidikan tinggi vokasi kepada industri. Dengan kondisi tersebut, mengakibatkan pola kerja sama yang dibangun antara pendidikan vokasi dengan industri masih pada tahap pemagangan, dan belum mengarah pada tahap perekrutan. Padahal, hilir dari kemitraan tersebut adalah terserapnya lulusan pendidikan vokasi ke industri.

Rendahnya kesadaran atau persepsi dan rendahnya kesetaraan akses pendidikan tinggi vokasi. Pada satuan pendidikan tinggi vokasi tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. SDM pendidikan tinggi vokasi yang dimaksud adalah: mahasiswa, dosen, pranata laboratorium pendidikan, dan pimpinan perguruan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi berbasis standar industri untuk memperoleh sertifikat kompetensi terstandar industri. Peningkatan kompetensi yang dimaksud adalah pemberian pelatihan yang berstandar industri.

Direktorat Jenderal Vokasi mengeluarkan kebijakan Taut dan Sesuai (*Link and Match*) untuk memastikan kurikulum yang diselenggarakan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi mempunyai relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan. Melalui kebijakan Taut dan Sesuai, perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi vokasi tidak dapat jalan sendiri, namun harus terus menerus melakukan upaya berkelanjutan dalam menjamin adanya kesesuaian antara *supply and demand* lulusan dengan yang dibutuhkan oleh industri.

Pendanaan pendidikan tinggi vokasi, bersumber dari APBN (rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak/PNBP), dengan adanya uang kuliah tunggal (UKT) sebagai pengganti SPP maka menjadi bagian dari PNBP. Beberapa sumber pendanaan PNBP dapat berasal dari UKT dan kerjasama industri pemerintah dan swasta (non-pendidikan), dapat menjadi tulang punggung pendanaan pendidikan (tinggi) vokasi dalam melakukan operasional pembelajaran.

Sertifikasi kompetensi dan hal-hal teknis lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta daya saing bangsa di tingkat internasional

1.7 Operasional Konsep

1.7.1. Pendidikan Tinggi Vokasi Di Era Revolusi Industri 4.0

Pendidikan tinggi vokasi kaitannya sangat erat pada pendidikan dan pelatihan, *hard skill* dan *soft skill* yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Pesatnya perkembangan teknologi yang memasuki revolusi industri 4.0 yang berdampak pada perubahan yang harus dihadapi pada pendidikan vokasi. Reformasi *Technical and Vocational Education and Training* (TVET) atau Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang sejalan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 dan pendidikan Abad XXI membutuhkan perubahan pada perkembangan teknologi, budaya, sosial, dan ilmu pengetahuan. Lebih jauh dijelaskan oleh Hang, Thuy & Tam (2018) bahwa dalam reformasi TVET untuk meningkatkan kualitas pelatihan dan kepuasan peserta didik, maka diperlukan tiga faktor penting yakni sumber daya manusia, peralatan pelatihan dan kemampuan teknologi.

Untuk menghadapi Abad 21 lulusan diharapkan memiliki multi kompetensi dan pengetahuan yang luas. Era revolusi industri mensyaratkan kemampuan dalam teknologi, sains, dan rekayasa. Untuk pertama kali istilah revolusi industri 4.0 diperkenalkan di Jerman pada tahun 2011. Era ini ditandai dengan dunia fisik, digital, *artificial intelligence*, *internet of things*, *advanced robotics* bioteknologi, *3D printing*, kendaraan otomatis, dan sistem virtual dan fisik yang bekerjasama secara global. Transformasi pendidikan era revolusi industri 4.0 mengubah paradigma pembelajaran, di mana peserta didik menjadi pusat pembelajaran dan peran guru sebagai pembimbing dan fasilitator. Peserta didik dapat berinteraksi dengan peserta didik lainnya, guru, maupun dengan para ahli. Selain itu pembelajaran dapat menjangkau wilayah geografis yang luas sehingga pembelajaran dapat terjadi dimana dan kapan saja tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu, dalam modus pendidikan/pelatihan jarak jauh dan *e-learning*.

Masuknya revolusi industri 4.0 merupakan peluang sekaligus ancaman, khususnya bagi negara dan sektor usaha yang tidak siap. Selain itu dampaknya juga terjadi pada pendidikan di Indonesia, yang secara kualitas belum terjadi kesesuaian antara *output* pendidikan dengan kebutuhan dunia usaha. (Afrina, Eka, dkk. 2018). Hal ini disebabkan ketimpangan di berbagai segi, baik dari segi kurikulum, sarana prasarana, termasuk ketersediaan teknologi dalam pembelajaran, serta kualitas pendidikannya. Lulusan SMK maupun dari perguruan tinggi vokasi masih belum terserap secara maksimal dalam dunia kerja disebabkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki lulusan masih bersifat umum, jauh dari kebutuhan industri dan kebutuhan lapangan kerja yang lebih spesifik (Wolf, et al.:2018). Dengan

demikian perlu perubahan yang bersifat reformatif dan transformatif pada sistem pendidikan maupun kurikulum pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dan di era revolusi industri 4.0.

1.7.2 Politik Pendidikan Tinggi Vokasi

Kelompok kepentingan pada pendidikan tinggi vokasi terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah terdiri dari legislatif dan eksekutif. Eksekutif terdiri dari bermacam-macam unsur, begitu juga masyarakat, sangat beragam. Ada yang secara pribadi terlibat, adapula yang terlibat dengan mewakilkan diri pada kelompok tertentu seperti melalui lembaga swadaya masyarakat, asosiasi profesi hingga dunia usaha dan dunia industri. Sumber daya yang ada jelas memiliki kepentingan yang berbeda. Sumber daya manusia pada pendidikan tinggi vokasi inilah yang menasbihkan diri sebagai aktor politik pendidikan vokasi. Aktor-aktor politik yang ada lalu memposisikan diri pada kutub yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Ada yang memposisikan diri sebagai kelompok penuntut, ada pula yang memposisikan diri sebagai kelompok pendukung karena perbedaan kepentingan itu. Kepentingan eksekutif adalah melaksanakan dan mencapai tujuan pendidikan vokasi yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Legislatif menjamin keberlangsungan pendidikan kejuruan demi pencapaian tujuan dengan menggunakan fungsinya sebagai legislator, *budgeter*, dan pengawas. Masyarakat memiliki kepentingan yang beragam, namun pada dasarnya kepentingan masyarakat adalah kepentingan pembiayaan, sarana prasarana, akses, kapasitas untuk mendapatkan keterampilan tertentu yang berguna untuk kehidupannya.

Perbedaan kepentingan dalam politik pendidikan kejuruan mengharuskan adanya konversi kepentingan agar seluruh kepentingan dapat terakomodasi. Konversi kepentingan dapat dilakukan melalui kebijakan dan konsensus yang lahir dari proses politik. Jika tidak maka kepentingan akan bias dan para aktor akan jalan hanya pada kepentingannya masing-masing.

Konversi kepentingan itu, tidak boleh hanya terjadi pada tingkatan elite pemerintah pusat. Konversi kepentingan itu harus didifusikan hingga ke tingkatan paling rendah. Oleh karena itu, pemerintah provinsi berperan untuk menginisiasi kebijakan sesuai dengan karakter daerah tanpa menyalahi amanah Undang-Undang sistem pendidikan nasional. Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengadopsi kebijakan pusat tetapi harus menginisiasi kebijakan lokal.

Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik mengaitkan studi kebijakan publik, khususnya kebijakan pendidikan dengan manajemen pendidikan akan selalu berbicara tentang manajemen pendidikan secara makro. Secara prinsip, manajemen pendidikan merupakan aplikasi ilmu manajemen ke dalam lingkup pendidikan dan merupakan bagian dari *applied sciences* terutama pada bidang pendidikan baik di sekolah maupun luar sekolah. Prinsip-prinsip yang dimiliki oleh manajemen pendidikan tidak berbeda dengan prinsip-prinsip yang ada pada konsep manajemen pada umumnya, demikian pula dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan adalah juga merupakan rangkaian konsep dari rumusan manajemen.

Penerapan manajemen di bidang pendidikan diarahkan pada usaha untuk menunjang kelancaran pencapaian tujuan pendidikan, sedangkan untuk fungsi dan strategi dari konsep manajerial pada prinsipnya sama dengan yang diterapkan dalam

lingkup manajemen. Manajemen pendidikan dapat dikatakan sebagai kegiatan penataan aspek pendidikan, termasuk dalam sistem penyelenggaraan pendidikan yang tercakup dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan, seperti yang dilakukan dalam kegiatan manajemen pendidikan di level nasional (makro) maupun level regional (meso). Aspek pendidikan yang merupakan kajian manajemen pendidikan merupakan *public goods* bukan *private goods*. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan barang dan jasa milik umum (publik), yang mana masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945), dan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakannya, utamanya peranan mendasar menyediakan kesempatan belajar. Oleh karena pendidikan merupakan *public goods*, maka sudah semestinya kajian kebijakan pendidikan masuk dalam perspektif kebijakan publik dalam dimensi kajian manajemen pendidikan yang multidisipliner.

Politik pendidikan vokasi yang optimal mengharuskan pemerintah menggunakan otoritasnya untuk mengatur diri dan kelompok kepentingan yang lain terutama swasta untuk berpartisipasi dalam pendidikan vokasi. Jika tidak maka politik pendidikan vokasi yang diarahkan pada pencapaian tujuan akan sulit tercapai. Sederhananya, politik pendidikan vokasi adalah alokasi sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan pendidikan vokasi. Sumber daya politik pendidikan tinggi vokasi yang memahami fungsinya akan membawa pendidikan vokasi berkarakter ke-Indonesia-an. Persoalan pelik yang dihadapi Negara dalam urusan ketenagakerjaan akan dijawab oleh pendidikan tinggi vokasi. Meski tidak sesederhana itu, variabel

ekonomi dan budaya tetap menjadi variabel lain jika mendekati pendidikan vokasi dari perspektif politik yang harus diperhatikan.

Masalah-masalah pendidikan tinggi vokasi umumnya terletak pada peningkatan kualitas akses dan peningkatan kualitas mutu. Secara umum pendidikan vokasi harus membangun regulasi kerangka kerja yang dapat mendorong investasi fisik, fiskal, dan modal manusia serta institusi makro-ekonomi dalam mengambil kebijakan keberlangsungan *output* dan pertumbuhan lapangan kerja. Reformasi kebijakan pendidikan tinggi vokasi dilakukan dengan mengevaluasi persediaan program-program Pendidikan tinggi vokasi dengan perubahan permintaan pasar kerja, membangun komitmen kerjasama, dan melakukan perbaikan dukungan implementasi. Hambatan besar yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi vokasi adalah ketidakcukupan anggaran biaya untuk pengembangan sarana dan prasarana penyelenggaraan pendidikan vokasi. Di samping itu ketidaklengkapan informasi ketersediaan *training* dan pragmentasi pelaksanaan kompetensi keahlian, lemahnya jaringan informasi diantara penyedia *training* dengan para pengguna, dan lemahnya kapasitas kemampuan lembaga pendidikan tinggi vokasi merupakan masalah-masalah utama pengembangan pendidikan vokasi.

Selain itu, kualitas pendidikan tinggi vokasi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas perguruan tinggi vokasi hanya berakreditasi C dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Di samping itu, perguruan tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi negara lain bahkan masih tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara

berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia dan menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun berada pada posisi yang masih rendah.

1.7.3 Kebijakan Merdeka Belajar

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbudristek melalui kebijakan merdeka belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi di seluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pementapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, kebijakan merdeka belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, pendidik lembaga pendidikan, dunia usaha dunia industri, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2 Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 1.2 diatas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya; peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan; perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

- a. ekosistem pendidikan;
- b. pendidik;
- c. pedagogi;
- d. kurikulum; dan
- e. sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbudristek akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan tenaga pendidik/dosen, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma tenaga pendidik/dosen sebagai penyampai informasi semata menjadi pendidik/dosen sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian dosen memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kampus. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi pendidik/dosen sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan pendidik berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi tenaga pendidik.³¹

Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna menampukkan tenaga pendidik/dosen dan mahasiswa menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Mahasiswa adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan peserta didik dan

³¹ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Hlm. 42-43

didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap mahasiswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio.³²

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur penelitian yang meliputi asumsi-asumsi luas hingga metode rinci dalam mengumpulkan dan analisis data. Rancangan tersebut melibatkan rancangan untuk meneliti penelitian ini.³³

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah menggunakan metode penelitian kualitatif. Di dalam metode penelitian kualitatif, objek dalam penelitian ini yakni mengenai dampak karhutla terhadap hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dimana hal ini merupakan suatu realitas sosial yang dipandang sebagai suatu gejala atau fenomena yang holistik, kompleks, dan penuh makna. Oleh sebab itu, hal ini tidak bisa diukur menggunakan metode penelitian kuantitatif.³⁴

³² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Hlm. 43

³³ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosadakarya, Bandung, 2007, hlm 6.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 9.

Rencana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis hingga menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sedang terjadi atau ada. Selain itu, penelitian kualitatif ditujukan untuk menggali informasi secara lebih dalam dan menjawab pertanyaan bagaimana. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada makna, memahami data yang tampak secara mendalam dan digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat diteliti oleh penelitian kuantitatif.³⁵

Metode penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami subyek penelitian misalnya: perilaku, persepsi, motivasi serta aktivitas.³⁶ Proses penelitian tersebut melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini, memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.³⁷ Penelitian kualitatif juga digunakan untuk mengamati kondisi obyek secara alamiah dan peran peneliti sebagai instrumen kunci.³⁸

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 9.

³⁶ Lexy J. Moeloeng., op.cit. 10.

³⁷ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 hlm 5.

³⁸ Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah: Panduan Berbasis Penelitian Kualitatif Lapangan dan Kepustakaan*, Gaung Ersada, Jakarta, 2007, hlm 31.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif. Peneliti telah melakukan eksplorasi berdasarkan data-data atau informasi yang dikumpulkan, menggunakan prosedur pengumpulan data selama periode tertentu untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti³⁹ mengenai kebijakan Kemendikbudristek dalam program peningkatan kualitas DIKSI (pendidikan tinggi vokasi) di Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 untuk mengantisipasi pengangguran tenaga terdidik dan SDM yang unggul.

Jadi dalam penelitian deskriptif analitis penelitian ini dilakukan dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan, hasilnya kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya oleh peneliti. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Penentuan metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, karena analisis ini dilakukan terhadap berbagai faktor yang terkait penelitian kasus yang diteliti mengenai kebijakan Kemendikbudristek dalam program penguatan DIKSI (pendidikan tinggi vokasi) di Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 untuk mengantisipasi pengangguran tenaga terdidik dan SDM yang unggul. Penelitian ini memusatkan diri

³⁹ John W. Creswell, *Research Design Third Edition*, Scottsdale Arizona, 2009 ,hlm 4-5

secara intensif terhadap bagaimana sebenarnya peran Kemendikbudristek atau langkah-langkah apa saja yang telah berjalan pada kebijakan mengembangkan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia saat ini.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Pemilihan situs atau lokasi penelitian yang penting untuk mempertanggungjawabkan data yang akan diambil. Pada penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi. Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

1.8.3 Informan Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dengan wawancara pada subjek penelitian yang terkait dengan judul penelitian. Pada penelitian ini akan dilakukan wawancara kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek: Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi atau Direktur.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Menurut Dewanto sumber data kualitatif adalah mempelajari sesuatu dalam *setting* apa adanya (*natural setting*), berusaha untuk membuat deskripsi obyektif fenomena sesuai dengan apa yang

dipersepsikan oleh subyek.⁴⁰ Kedua teknik tersebut digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian ini. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur yang merujuk pada pedoman wawancara yang sesuai dengan data yang diharapkan. Rencana wawancara dilakukan di Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi Dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mencari serta mempelajari data-data seperti dari buku, dokumen yang memang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kemendikbudristek itu sendiri, majalah, surat kabar dan dari dokumen tertulis, dan sumber internet yang terkait dengan topik penelitian ini.

1.8.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa induktif. Peneliti melakukan analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh.⁴¹

1.8.5.1 Reduksi Data

Data yang ada di lapangan jumlahnya sangat banyak dan kompleks sehingga peneliti telah melakukan analisis melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi adalah data terkait dengan penelitian yang berfokus pada tujuan penelitian. Sehingga, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang

⁴⁰ Dewanto, *Metodologi Penelitian, tinjauan Filosofis dan Praksis*, UPT UNNES Press, Semarang, 2005, hlm. 70.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 243.

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁴²

1.8.5.2 Data Display (Penyajian Data)

Setelah melakukan reduksi data tahapan selanjutnya yang telah dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data, hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan serta untuk menentukan langkah selanjutnya. Dalam penelitian kualitatif jenis penyajian data dapat berupa uraian-uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori.⁴³

1.8.5.3 Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁴⁴ Oleh karena permasalahan dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat mengalami perkembangan, maka kesimpulan dari penelitian kualitatif bersifat dinamis dan tidak kaku

⁴² *Ibid.*, Hlm. 247.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2014, Hlm. 249.

⁴⁴ *Ibid.*, Hlm. 252